BAB IV

HASIL YANG DICAPAI

4.1 Pelaksanaan KKL-PPM Di Desa Cibeureum Kecamatan Kertasari Kabupaten Bandung

Dalam pelaksanaan program KKL-PPM terlebih dahulu mahasiswa diberi beberapa kali materi pembekalan oleh dosen pembimbing dalam bentuk konsolidasi tentang KKL-PPM yang bertujuan untuk pembekalan pengetahuan peserta KKL-PPM agar siap melaksanakan disaat pelaksanaan KKL-PPM di Desa Cibeureum. Mahasiswa peserta KKL-PPM di bentuk berkelompok yang bertujuan agar dapat memudahkan dan bisa bekerja sama disaat pelaksanaan program-program yang akan di implementasikan disaat KKL-PPM berlangsung.

Pelaksanaan KKL-PPM akan menjadi pembelajaran untuk mahasiswa dalam bermasyarakat yang bermaksud memberikan gambaran kepada mahasiswa tentang bagaimana cara berbaur dengan masyarakat di Desa Cibeureum. Sehingga mahasiswa dapat mempersiapkan diri bila kelak nanti akan menjadi seorang aparatur pemerintahan yang mampu memimpin dan bersikap adil kepada rakyatnya. Pembekalan KKL-PPM meliputi pemberian materi-materi mengenai cara bersikap di lingkungan masyarakat sampai penyusunan laporan KKL-PPM.

Penyerahan mahasiswa KKL-PPM Unikom ke Desa Cibeureum Kecamatan Kertasari Kabupaten Bandung pada hari minggu tanggal 14 Juli 2013 yang berlokasikan di Madrasah Aliyah Nurul Huda Kertasari yang diserahkan langsung oleh Koordinator KKL-PPM Unikom kepada Kepala Desa Cibeureum, mahasiswa KKL-PPM berjumlah 20 orang yang terdiri dari 17 orang laki-laki dan 3 orang perempuan. Program kegiatan KKL-PPM Unikom ini merupakan satu bentuk kegiatan yang bisa digunakan sebagai suatu proses pembelajaran bagi beberapa pihak yang terkait, baik yang berhubungan dengan masyarakat secara

langsung maupun proses pembelajaran yang berhubungan dengan pengembangan kedewasaan sosial mahasiswa serta yang berhubungan dengan institusi yang berwenang. Adapun rancangan kegiatan KKL-PPM Unikom yang dilaksanakan pada minggu pertama meliputi beberapa kegiatan seperti persiapan, pendekatan, inventarisasi dalam melaksanakan kegiatan diberbagi bidang diantaranya pendidikan, pemerintahan, kesehatan, sosial budaya dan hukum, serta penyusunan kegiatan program kerja. Penyusunan Program minggu pertama berdasar pada tahap hasil observasi awal dan wawancara serata mengikuti semua kegiatan yang diadakan masyarakat desa Cibereum dan melakukan ekspose kepada kepala Dusun serta kepala RW di desa Cibereum.

Minggu kedua kegiatan program yang telah disusun pada minggu pertama mulai dilaksanakan secara rutin dan berdasarkan buku panduan dan program-program yang telah dibuat mulai diimplementasikan dilingkungan masyarakat dari segi bidang pendidikan, pemerintahan, kesehatan dan sosial ekonomi budaya dan hukum. Pada minggu ketiga mengadakan event puncak dimana penulis dan rekan mahasiswa KKL-PPM mengadakan bakti sosial yang bertemakan penyuluhan gebyar Posyandu dan berkerja sama dengan tim SUN layanan unit mobil gizi.

Dalam porgram pendidikan penulis yakni memberi pengajaran didalam bidang ICT seperti pengenalan komputer baik software maupun hardware, beberapa software komputer seperti pengenalan Ms Office dan Software simulasi merakit komputer, pengenalan hardware yang dimulai dari sejarah komputer sampe cara merakit komputer dan pengenalan internet dengan dibarengi pengajaran cara menggunakan internet dengan baik dan benar kepada perangkat desa dan para siswa dari SMP Muhammadiah 3 kertasari serta Siswa Madrasah Aliyah Nurul Huda Kertasari, dengan beberapa pengenalan dan pengajaran ini para aparatur desa dan siswa yang sebelumya tidak mengetahui menjadi

tahu dan paham serta dapat menggunakan komputer dan memanfaatkan tekonologi ICT dengan baik.

Di bidang sosial, ekonomi budaya dan hukum penulis dan rekan mahasiswa KKL-PPM memberikan bantuan beberapa perangkat Komputer kepada apartur Desa Cibeureum dan Madrasah Aliyah Nurul Huda Kertasari karena perangkat komputer yang masih minim menjadi kendala didalam pelaksanaan program kegiatan ICT baik di aparatur desa maupun sekolah tempat penulis melakukan kegiatan pengajaran, dengan bantuan beberpa perangkat komputer ini dapat menunjang dan mempermudah kegiatan-kegiatan birokrasi yang ada di desa, dan kegiatan pengajaran ICT di Madrasah Aliyah Nurul Huda Kertasari dapat berjalan baik karena siswa dapat memperaktekannya secara langsung. Selain itu penulis dan rekan mahsiswa KKL-PPM membangun plang batas desa serta plang-plang nama jalan di Desa Cibeureum, Pembuatan plang jalan ini dikarenakan tidak adanya tanda batas wilayah desa dan nama-nama jalan yang menyulitkat untuk mencari alamat di Desa Cibeureum, dengan pembuatan plang nama jalan dan batas-batas wilayang dapat mempermudah dalam mencari alamat dan mengetahui batas-batas wilayah di Desa Cibeureum.

Dari bidang Bidang Kesehatan penulis dan rekan KKL-PPM Unikom melakukan survey terhadap kesehatan dan lingkungan masyarakat desa seperti imunisasi, KB, posyandu, dan yang bersangkutan dengan masalah kesehatan lainnya, salah satunya bertemu dengan para kader posyandu. Penulis dan rekan kelompok mengadakan acara bakti sosial dengan mengadakan penyuluhan program gebyar Posyandu. Dimana hasil yang dicapai adalah para ibu hamil, ibu menyusi semakin paham akan program-program posyandu.

4.2 Pelaksanaan Kegiatan Program Pendidikan dan Pengenalan ICT dan Perakitan Komputer

Dalam menganalisis pelaksanaan program pendidikan dan pengenalan ICT dan Perakitan Komputer di SMP Muhammadiyah 3 Kertasari dilakukan melalui teori implementasi dan kebijakan dari George C. Edwards III, dapat diuraikan adalah sebagai berikut:

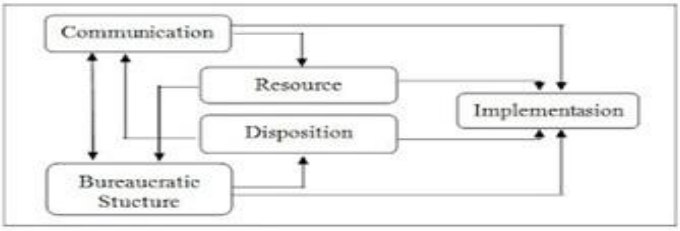
> *"Implementasi kebijakan adalah tahap pembuatan kebijakan antara pembentukan kebijakan seperti bagian dari tindakan legislatif, menerbitkan perintah eksekutif, penyerahan down keputusan peradilan, atau diterbitkannya peraturan aturan dan konsekuensi dari kebijakan bagi orang-orang yang memengaruhi". (Edwards III, 1980:01).*

Berdasarkan pengertian Implementasi kebijakkan di atas, maka edwards III menunjuk empat variabel yang berperan penting dalam pencapaian keberhasilan implementasi yaitu:

1. Comunication (komunikasi)
2. Resources (sumberdaya)
3. Disposition (disposisi/sikap)
4. Bureaucratic structure (struktur birokrasi)
   (Edwards III, 1980:10-11).

Dari penjelasan yang disampaikan oleh edwards III di atas, selanjutnya Edwards III membuat model *Direct and Indirect Impact of Implementation,* dapat dilihat dibawah ini:

Tabel :4.1
Tabel Teori Edward III



(sumber: George Edwards III, 1980:148)

Model pendekatan implementasi di atas, yang di kemukakan oleh Edwards III merupakan sebuah abstraksi atau performasi dari suatu kebijakan yang pada dasarnya dilakukan untuk meraih kinerja implementasi kebijakkan publik yang tinggi, yang berlangsung dalam hubungan berbagai variabel dan secara berkesinambungan atau berhubungan.

Untuk mendukung proses implementasi kebijakan publik tersebut, menurut edwards III, ada empat faktor atau variabel penentuan yaitu:

1. "*Communications*, mempunyai peranan yang penting sebagai acuan pelaksanaan kebijakan mengetahui persis apa yang akan dikerjakan, ini berarti komunikasi juga dinyatakan dengan perintah dari atasan terhadap pelaksanan kebijakan, sehingga komunikasi harus dinyatakan dengan jelas, cepat dan konsisten.
2. *Resouces*, bukan hanya menyangkut sumber daya manusia semata melainkan juga mencakup kemampuan sumber daya mineral lainnya yang mendukung kebijakan tersebut dan faktor dana.
3. *Dispositions*, sebagai kegunaan dikalangan pelaksana untuk menerapkan kebijakan, jika penerapan dilaksanakan secara efektif. Pelaksana bukan hanya harus tahu apa yang harus dikerjakan, tetapi harus memiliki kemampuan untuk menerapkan kebijakan itu.
4. *Bureaucratic Structure*, mempunyai dampak terhadap penerapan kebijakan dalam arti bahwa penerapan kebijakan tidak akan berhasil jika terdapat kelemahan dalam struktur. Dalam hal ini ada 2 karakteristik birokrasi yang umum, penggunaan sikap dan prosedur yang rutin, serta transpormasi dalam pertangungjawaban di antara unit organisasi". (George Edward III (1980:10-11).

Pertama, *communication* (komunikasi) menurut George C. Edwards III yaitu:

> *"The first requirement for effective policy implementation is that those who are implement a decision must know what they are supposed to do. Policy decisions and implementation orders must be followed. Naturally, these communications need to be accurate and they must be accurately perceived by implementers. Many obstacles lie in the path of transmission of implementation communication". (Edwards III, 1980:17).*

Komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari pelaksanaan. Pelaksanaan yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan dikerjakan. Pengetahuan atas apa yang akan dikerjakan dapat berjalan bila komunikasi berjalan dengan

baik, sehingga setiap keputusan dan peraturan pelaksanaan harus ditransmisikan (dikomunikasikan) kepada bagian personalia yang tepat. Komunikasi dalam kebijakan memiliki beberapa macam dimensi antara lain: dimensi transformasi atau penyampaian informasi kebijakan publik, kejelasan, dan konsistensi. Semakin baik koordinasi komunikasi diantara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi maka terjadinya kesalahan-kesalahan akan sangat kecil untuk terjadi dan begitu pula sebaliknya.

> *Komunikasi adalah proses penyampaian pesan informasi, ide, dan gagasan dari satu pihak kepada pihak lain. komunikasi merupakan syarat utama dalam implementasi kebijakan untuk berjalan lebih efektif. Para pelaksana kebijakan harus dapat mengetahui apa yang seharusnya mereka lakukan. Keputusan-keputusan dan perintah-perintah harus dilanjutkan oleh para pelaksana dengan tepat sebelum keputusan-keputusan dan perintah-perintah itu dapat diikuti. Terdapat tiga dimensi yang termasuk kedalam komunikasi Menurut pendapat George C. Edwards III dalam bukunya Implementing Public Policy bahwa komunikasi terdiri dari transmision (penyampaian informasi), clarity (kejelasan), dan consistency (konsistensi). (Edwards III, 1980:10).*

Kedua, *Resources* (sumber daya) menurut George C. Edwards III yaitu:

> *“No matter how clear and consistent implementation orders are and no matter how accurately they are transmitted, if the personnel responsible for carrying out policies lack the resources to do an effective. Important resources include staff of the proper size and with the necessary expertise; relevant and adequate information on how to implement policies and on the compliance of the others involved in implementation; the outhority to ensure that policies are carried out as they are intended; and facilities (including buildings, equipment, land and supplies) in which or with which to provide services. Insufficient resources will mean that laws will mean that laws will not be enforced, services will not provided, and reasonable regulation in policy implementation”. (Edwards III, 1980:53).*

Keberhasilan implementasi kebijakan bukan hanya ditentukan oleh sejauhmana para pelaku kebijakan (*implementors*) mengetahui apa yang harus dilakukan dan mampu melakukannya, tetapi juga ditentukan oleh keinginan para pelaku kebijakan memiliki disposisi yang kuat terhadap kebijakan yang sedang diimplementasikan.

Sumber daya mempunyai peranan penting dalam implementasi kebijakan, karena bagaimanapun jelas dan konsistensi ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan suatu kebijakan. Jika para implementor mengimplementasikan kebijakan kurang mempunyai sumber-sumber untuk melakukan pekerjaan secara efektif, maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berjalan dengan efektif. Faktor-faktor dalam sumber daya menurut pendapat George C. Edwards III dalam bukunya Implementing Poblic Policy yaitu staff (aparatur), information (informasi), Authotity (wewenang), dan Facilities (fasilitas). (Edwards III, 1980:10-11).

Berdasarkan pendapat edwars diatas dapat dijelaskan bahwa dalam sumber daya terdapat empat faktor yaitu:

1. Staff (aparatur) adalah pelaku kebijakan dan memiliki kewenangan yang diperlukan dalam suatu kebijakan agar dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang telah direncanakan.
2. *Information* (informasi) adalah data yang diolah menjadi suatu bentuk lain yang lebih berguna yaitu pengetahuan atau keterangan yang ditujukan bagi penerima dalam pengambilan keputusan baik pada masa sekarang atau yang akan datang dalam melaksanakan dan mematuhi apa yang telah menjadi tugas dan kewajibannya.
3. *Authority* (kewenangan) adalah kewenangan yang bersifat formal yang dikeluarkan dalam melaksanakan kebijakan.
4. *facilities* (fasilitas) adalah sumber daya peralatan pendukung dalam melakukan tugas operasionalnya (sarana dan prasarana) hal terpenting yang harus dimiliki oleh pelaksana kebijakan.

Ketiga, Dispotition (disposisi) menurut George C. Edwards III, yaitu:

"The dispositions or attitudes of implementation is the third critical factor in our approach to the study of public policy implementation. If implementation is to proceed effectively, not only must implementers know what to do and have the capability to do it, but they must also desire to carry out a policy. Most implementers can exercise considerable discretion in the implementation of policies. One of the reasons for this is their independence from their nominal superiors who formulate the policies. Another reasons is the complexity of the policies them selves. The way in which implementers exercise their direction, however, defend in large part upon their dispositions toward the policies, their attitudes, in turn, will be influenced by their view toward the policies per see and by how they see the policies effecting their organizational and personal interest". (Edwards III, 1980:89).

Berdasarkan penjelasan di atas bahwa disposisi adalah watak atau karakteristik yang dimiliki oleh pelaksana kebijakan seperti memiliki kejujuran, mempunyai komitmen, dan sifat demokratik. Apabila pelaksana kebijakan mempunnyai karakteristik atau watak yang baik, maka dia akan melaksanakan kebijakan dengan baik sesuai dengan sasaran tujuan dan keinginan pembuat kebijakan.

> *Disposition (sikap pelaksana) adalah kecenderungan-kecenderungan, keinginan atau kesepakatan para pelaksana untuk melaksanakan kebijakan secara sungguh-sungguh apa yang menjadi tujuan kebijakan untuk dapat diwujudkan. Menurut George C. Edwards III dalam bukunya Implementing Public Policy terdapat dua faktor dalam Disposition (sikap pelaksana) yaitu Effects Of Disposition (tingkat kepatuhan pelaksana) dan Incentives (insentif). (Edwards III, 1980:11).*

Berdasarkan pendapat di atas bahwa disposisi diartikan sebagai sikap para pelaksana untuk mengimplementasikan kebijakan, dalam implementasi kebijakan jika ingin berhasil secara efektif dan efisien. Maka para implementor tidak hanya mengetahui apa yang harus mereka lakukan dan mempunyai kemampuan untuk implementasi kebijakan tersebut, tetapi mereka lakukan dan mempunyai keinginan untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut. Hal-hal yang terpenting dalam disposisi antara lain *Effect Of disposition* (tingkat kepatuhan pelaksana) dan *Incentives* (pemberian insentif). *Effect Of Disposition* (tingkat kepatuhan pelaksana) adalah kecenderungan-kecenderungan pelaksana menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan. Sedangkan *Incentives* (pemberian insentif) adalah kecenderungan yang ada pelaksana melalui manipulasi *incentives* oleh pembuat kebijakan melalui keuntungan-keuntungan atau biaya-biaya akan membuat pelaksana melaksanakan perintahnya dengan baik.

Keempat, Bureacratic Structure (Struktur Birokrasi) menurut George C. Edwards III dalam bukunya Implementing Public Policy, yaitu:

> *“Policy implementers may know what to do and have sufficient desire and resources to do it, but they may still be hampered in implementation by the structures of the organizations in which they serve, two prominent characteristics of bureaucracies are standarf operating procedurs*

> *(SOPs) and fragmentation the former develop as internal respons to the limited time and resources of implementers and the desire for uniformity in the operation of complex and widely dispersed organizations; they often remain in force due to bureaucratic inertia". (Edwards III, 1980:125).*

Bureaucratic structure merupakan suatu badan yang terlibat dalam implementasi kebijakan secara keseluruhan. Struktur organisasi bertugas melaksanakan kebijakan memiliki pengaruh besar terhadap pelaksanaan kebijakan, didalam sturktur birokrasi terdapat dua hal penting yang dapat mempengaruhinya salah satunya yaitu aspek struktur birokrasi yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi standar (Standard operating procedurs) atau SOP.

SOP ini merupakan pedoman untuk para pelaksana kebijakan dalam bertindak atau menjalankan tugasnya. Selain SOP yang mempengaruhi struktur birokrasi adalah fragmentasi yang berasal dari luar organisasi.

Standard Operating Procedures (SOP) adalah mekanisme, sistem dan prosedur pelaksanaan kebijakan, pembagian tugas pokok, fungsi kewenangan dan tanggung jawab yang dilaksanakan oleh pelaksana kebijakan. Sedangkan *fragmentation* (fragmentasi) adalah penyebaran tanggung jawab atas suatu kebijakan antara beberapa unit organisasi oleh pelaksana kebijakan.

Berdasarkan pengertian-pengertian diatas bahwa implementasi kebijakan adalah rangkaian tindakan-tindakan yang nyata dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan dalam keputusan kebijaksanaan yang dilakukan individu atau kelompok-kelompok tertentu, sehingga menciptakan suatu hasil dari kinerja implementasi kebijakan yang baik dalam hal pelayanan publik kepada masyarakat.

Dalam menganalisis pelaksanaan program pendidikan dan pengenalan perakitan komputer maka penulis menganalisis melalui teori implementasi kebijakkan dari Edwards III yaitu sebagai berikut:

4.2.1 komunikasi dalam pelaksanaan program pendidikan dan pengenalan perakitan komputer di SMP Muhammadiyah 3 Kertasari

Komunikasi dalam pelaksanaan program pendidikan dan pengenalan perakitan komputer di SMP Muhammadiyah 3 kertasari ini adalah hal yang sangat penting demi efektifnya suatu penyampaian, maka dalam hal ini komunikasi narasumber kepada komunikan yaitu siswa kelas IX dalam pemberian materi pengenalan dan perakitan komputer. Komunikasi disini adalah siswa sangat aktif berkomunikasi dengan narasumber yaitu pengajar. Maka dari itu komunikasi pada saat kegiatan berlangsung sangat baik antara komunikan dan komunikator. Adapun dalam hal ini komunikasi antara komunikan dan komunikator dengan menggunakan suatu media, media yang dipakai disini adalah dengan menggunakkan suatu media, game edukasi perakitan komputer untuk membantu narasumber dalam menyampaikan informasi yang berhubungan dengan perakitan komputer.

Gambar: 4.1
Komunikasi narasumber dengan siswa



(Sumber: Dokumentasi KKL-PPM Unikom 20 Juli 2013)

4.2.2 Sumber Daya pada pelaksanaan Program pendidikan dan pengenalan perakitan Komputer di SMP Muhammadiyah 3 Kertasari

Sumber daya dari pelaksanaan program pendidikan dan pengenalan perakitan komputer di SMP Muhammadiyah 3 kertasari ini meliputi siswa dan siswi kelas IX, guru mata pelajaran TIK (Teknologi Informasi Komunikasi). Mengamati sumber daya dari para siswa kelas IX adalah kemampuan untuk memahami dalam hasil penyampaian materi dari narasumber, yang terlihat kemampuan para siswa dalam penerimaan penyampaian materi dan praktek perakitan komputer siswa cukup memahami materi-materi dan memahami bagaimana cara perakitan game simulasi perakitan komputer. Jelas ini membuktikan bahwa sumber daya pada masyarakat aademisi SMP Muhammadiyah 3 kertasari khususnya kelas IX sangat baik para siswa merespon dengan baik dan cepat memahaminya. Walaupun sumber daya sarana prasarana yang ada didalam SMP Muhammadiyah masih kurang memadai dan kurang mendukung untuk adanya kurikulum berbasis ICT.

Gamba: 4.2

Sumber daya siswa dalam pelaksanaan prakitan komputer melalui game



(Sumber: Dokumentasi KKL-PPM Unikom 20 Juli 2013)

4.2.3 Disposisi Pada Pelaksanaan Program pendidikan dan pengenalan perakitan Komputer di SMP Muhammadiyah 3 Kertasari

Disposisi disini adalah pelaksanaan kegiatan yaitu mahasiswa KKL-PPM Unikom dengan bekerja sama dengan pihak sekolah SMP Muhammadiyah 3 Kertasari yaitu guru-guru dan siswa siswi kelas IX selaku. Maka dari itu pelaksanaan program pendidikan dan pengenalan perakitan Komputer yaitu mahasiswa KKL-PPM unikom ini dimana dalam merencanakan maupun dalam pelaksanaan harus mempunyai komitmen yang sangat kuat. Maka dari itu pelaksana pada kegiatan ini harus tau apa yang musti disampaikan kepada para siswa dan siswi mengenai sejarah dan pengenalan perakitan komputer, supaya siswa dapat mengikuti dan mudah untuk di pahami oleh siswa dan siswi apa itu tentang sejarah komputer dan bagaimana cara perakitan komputer yang baik dan benar.

Kesimpulannya kunci keberhasilan dari pelaksanaan pengajaran ini yaitu siswa dan siswi bisa memahami dan memperaktekan dalam kehidupan sehari-hari dan bisa dipergunakan ilmu tersebut untuk kemajuan dalam dunia pendidikan ICT di SMP Muhammadiyah 3 Kertasari.

Gambar: 4.3

Suasana siswa dan siswi dalam pelaksanaan belajar



(Sumber: Dokumentasi KKL-PPM Unikom 20 Juli 2013)

4.2.4 Struktur Birokrasi pada Pelaksanaan Program pendidikan dan pengenalan perakitan Komputer di SMP Muhammadiyah 3 Kertasari

Struktur birokrasi juga tidak kalah pentingnya dalam pelaksanaan program pendidikan dan pengenalan perakitan Komputer di SMP Muhammadiyah 3 Kertasari, perlu adanya *Standard Operating Procedure* dalam hal ini pembagian tanggung jawab atau tugas. Setiap pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan kegiatan pengajaran yang berlangsung harus tahu akan tugasnya masing-masing. Untuk mahasiswa sebagai pelaksana harus menyiapkan mekanisme pengajaran dalam penyampaian materi pengenalan dan game simulasi perakitan komputer, supaya dapat memotifasi keinginan tahu para siswa dan siswi. Kami juga harus mengikuti prosedur dan tata tertib yang berlaku di SMP Muhammadiyah 3 Kertasari yang berlaku karena di SMP Muhammadiyah 3 Kertasari memiliki susunan birokrasi yaitu, di SMP Muhammadiyah di pimpin oleh kepala yayasan dan dibawahi tingkat sekolah di pimpin oleh kepala sekolah dan dibantu oleh para guru setiap mata pelajaran yang akan menyampaikan setiap pelajaran yang akan disampaikan kesetiap peserta didik. Jadi di SMP Muhammadiyah 3 Kertasari pun harus memiliki SOP untuk standar pengajaran dan pelaksanaan pengajaran.

Gambar 4.4
Permintaan Izin mengajar kepada guru kesiswaan



(Sumber: Dokumentasi KKL-PPM Unikom 19 Juli 2013)

Adapun hasil yang di dapat setelah diadakkannya program pengenalan dan perakitan komputer melalui game simulasi perakitan komputer kepada siswa kelas IX di SMP Muhammadiyah 3 Kertasari yaitu:

1. Menciptakan kondisi belajar yang menyenangkan dan mengasikkan.
2. Siswa dan siswi akan lebih aktif dalam proses belajar.
3. Membekali siswa dan siswi dalam menggunakan teknologi tinggi.
4. Mendorong lahirnya pribadi kreatif dan mandiri pada diri siswa.
5. Membantu siswa dan siswi yang memiliki kecakapan dalam belajar.